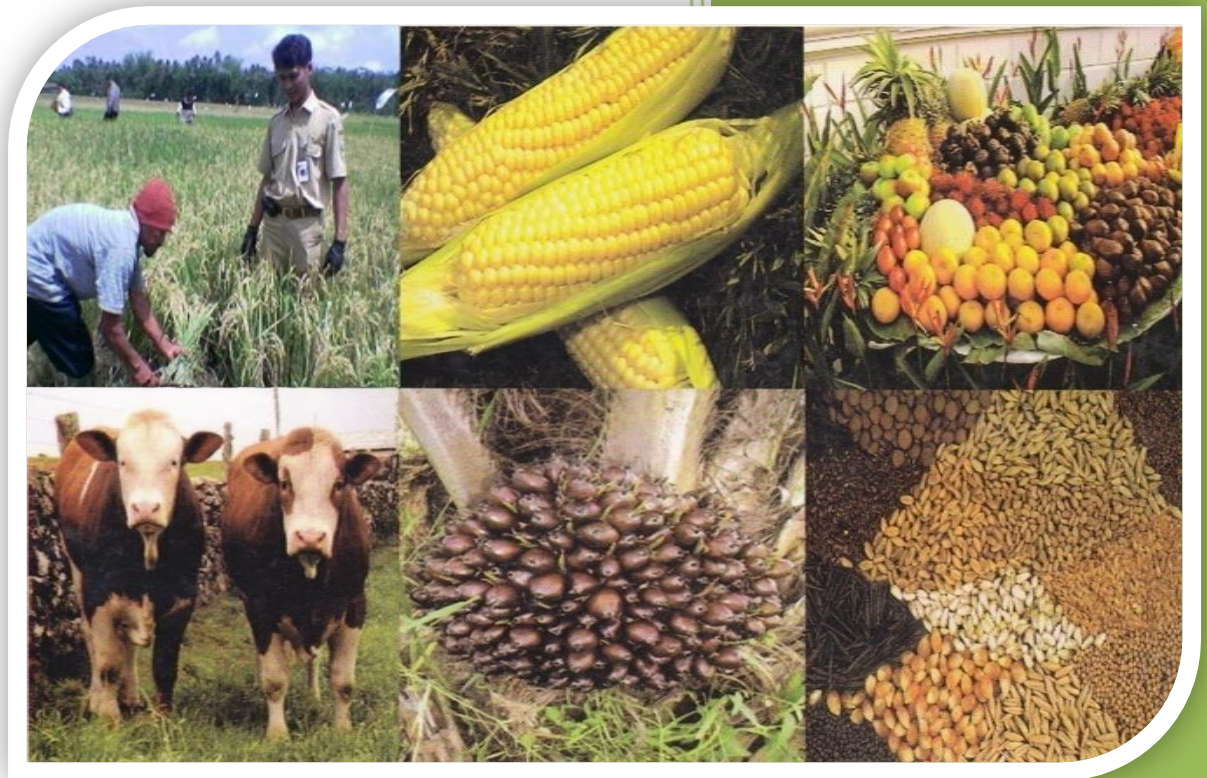


# RENSTRA REVISI I



**DINAS PANGAN  
KABUPATEN BERAU**

**OKTOBER TAHUN 2018**

## ***KATA PENGANTAR***

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Renstra Dinas Pangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016-2021 dapat diselesaikan.

Dalam Renstra ini disajikan informasi yang terkait dengan capaian kinerja Rensra Periode sebelumnya yaitu Tahun 2011-2015, dan rencana kerja Dinas Pangan di Kabupaten Berau lima tahun kedepan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2016-2021, yang di tetapkan melalui “Peraturan Daerah Kabupaten Berau” Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan kerja dan Penyelenggaraan Program/Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Berau, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rensta ini, kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Redeb, Oktober 2018

Kepala Dinas Pangan  
Kabupaten Berau,

**FATTAH HIDAYAT, SE.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620828 198902 1 002

## DAFTAR ISI

## HAL

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	II-1
2.1 Sumber Daya SKPD .....	II-5
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	II-8
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	II-14
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-6
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi .....	III-11
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	III-25
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	IV-1
4.1 Visi dan Misi SKPD.....	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran .....	IV-4
4.3 Strategi .....	IV-8
4.4 Kebijakan .....	IV-9
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	V-1
5.1 Program SKPD .....	V-1
5.2 Indikator Kinerja SKPD .....	V-9
5.3 Kelompok Sasaran .....	V-10
5.4 Pendanaan Indikatif .....	V-10
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	VI-1
BAB VII. PENUTUP. ....	VII-1
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah administrative Propinsi Kalimantan Timur dan terletak dibagian utara. Luas wilayahnya 34.127 Km<sup>2</sup> dan secara geografis berada pada posisi antara 116° - 119° Bujur Timur dan 1° - 2°33' Lintang Utara.

Kondisi alam Kabupaten Berau didominasi oleh wilayah daratan, yang luasnya mencapai sekitar 70 % dari luas wilayah 34.127 Km<sup>2</sup>. Luasan tersebut setara dengan 11,45 % dari luas total Propinsi Kalimantan Timur. Jurisdiksi Kabupaten Berau yang berwujud perairan hanya terdapat di sebelah timur.

Wilayah administrasi Kabupaten Berau dibagi dalam 13 kecamatan yang terdiri dari sebanyak 101 kampung dan 9 kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

- Wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan
- Wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur
- Wilayah Timur dibatasi oleh laut Sulawesi
- Wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Bulungan dan Kutai Timur

Keadaan Topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Wilayah daratan tidak terlepas dari perbukitan yang terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan batu kapur memanjang dari hampir mencapai 100 Km. Selanjutnya di Kecamatan Talisayan terdapat perbukitan dan yang tertinggi dikenal dengan nama Bukit Padai. Sedangkan danau berjumlah 7 buah, keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Berau dengan luas keseluruhan danau mencapai 15 Ha.

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Talisayan, Biduk-Biduk dan Pulau Derawan serta Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Khusus Kecamatan Pulau Derawan

dan Maratua terkenal sebagai daerah tujuan wisata dimana pantai dan alam bawah lautnya memiliki panorama yang indah.

Sebaran penduduk Kabupaten Berau tidaklah merata, daerah yang landai hanya 5,4 % dari luas total Kabupaten Berau, penyebaran penduduk berada di Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung dan Teluk Bayur, yang dihuni 69 % penduduk Kabupaten Berau, dimana konsentrasi Kecamatan Kelay merupakan wilayah yang kepadatan penduduknya terendah di Kabupaten Berau.

Sampai dengan akhir 2014 menurut data statistik jumlah penduduk di Kabupaten Berau sebanyak 209.668 jiwa. Hal ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya (2013) yang berjumlah 201.565 jiwa, maka terjadi penambahan penduduk sebanyak 8.103 jiwa atau meningkat sebesar 4,02 %.

Perkembangan Penduduk tersebut terjadi karena semakin berkembangnya investasi di Kabupaten Berau, serta semakin terbukanya akses yang mempermudah /memperlancar mobilisasi manusia maupun barang. Kondisi perkembangan penduduk ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Dalam upaya mencapai ketahanan pangan tersebut diperlukan berbagai upaya secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu, terencana dengan baik. Perencanaan strategis (renstra) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa renstra ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk

diimplementasikan oleh jajaran Dinas Pangan Kabupaten Berau dalam pencapaian tujuan organisasi.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

- 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126);
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 227);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Permendagri Nomor: 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor: 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau
- 12) Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Berau

### **1.3.MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan rencana strategis mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan Strategis.

Berlangsungnya reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma Pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan Strategis, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Berau.

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang membimbing organisasi sehingga tidak salah arah dan sasaran. Semua itu bisa dimungkinkan karena didalam Restra telah ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur organisasi.

3. Tersusunnya berbagai kebijaksanaan dan Program Dinas Pangan Kabupaten Berau.

Berdasarkan faktor-faktor kunci yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

4. Pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan Kabupaten Berau.

Renstra ini suatu pedoman pembangunan bidang Ketahanan Pangan yang pada akhirnya sebagai pedoman dalam penyusunan LAKIP.

5. Dengan Renstra diharapkan dapat terwujud pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Berau.

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka pembangunan bidang Ketahanan Pangan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan keberhasilan kepada masyarakat.

#### 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategi (Renstra).

##### SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

###### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

###### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
  1. Tantangan Pengembangan Pelayanan
    - Belum Terpenuhinya Kebutuhan Pangan
    - Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
    - Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan
    - Penganekaragaman, dan Pola Konsumsi Pangan
    - Keamanan Pangan
  2. Peluang Pengembangan Pelayanan
    - Aspek Ketersediaan Pangan
    - Aspek Distribusi Pangan
    - Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan
    - Manajemen Ketahanan Pangan

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
  - Telaahan Restra Dinas Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018
- 3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Strategi
- 4.4. Kebijakan

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Program SKPD

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penjelasan tentang output dan outcome yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas Pangan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7) dan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Berau. Bab III pasal 4 disebutkan bahwa rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan adalah:

***Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan.***

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pangan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pangan;
- d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

***Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.***

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merencanakan pembangunan di bidang pangan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;

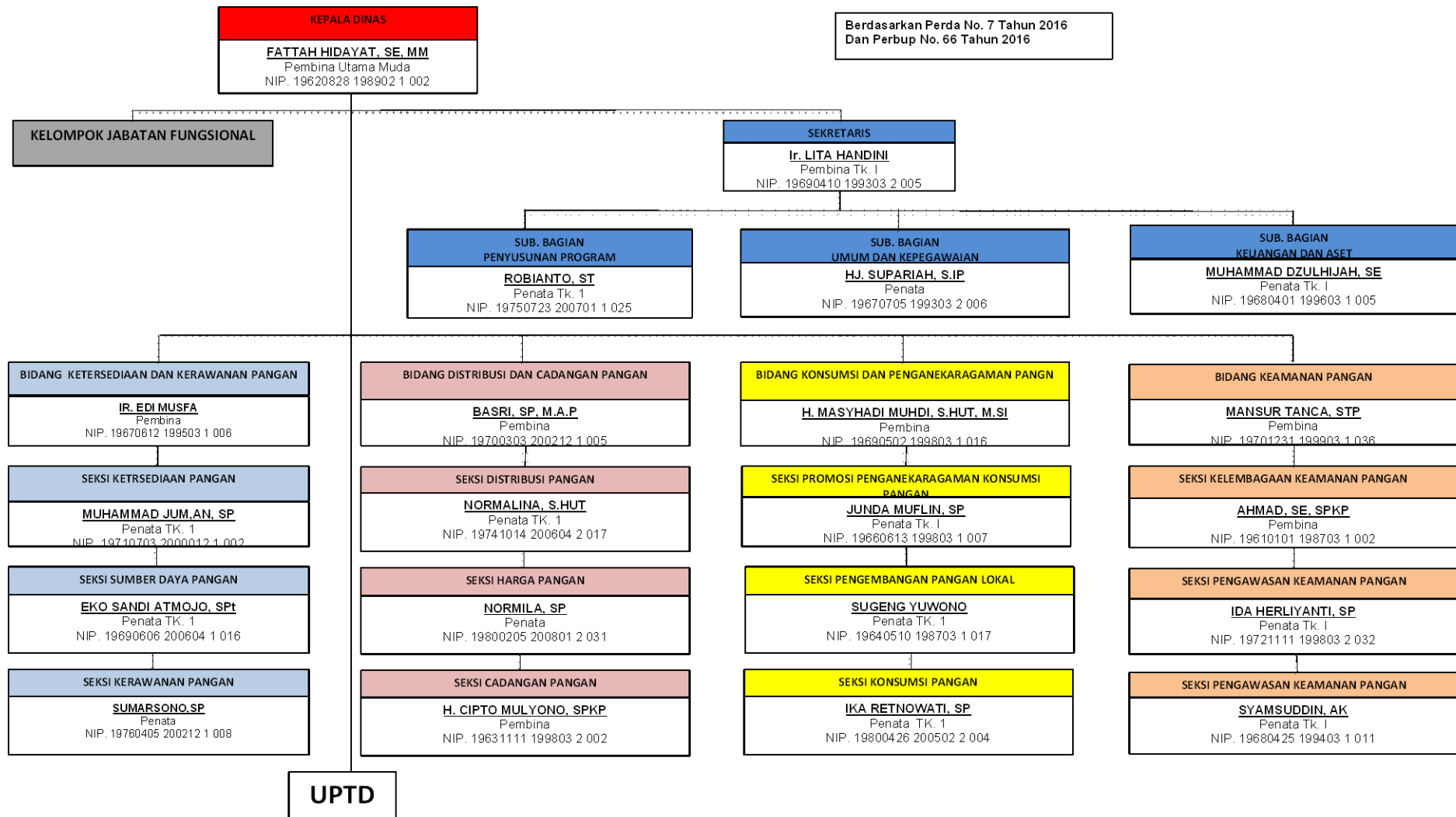
- b. menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pangandengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
- j. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- l. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Dalam Rangka Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Dinas Pangan Kabupaten Berau, Ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Berau, adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.  
Struktur Organisasi**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN  
KABUPATEN BERAU TAHUN 2018**



## STRUKTUR ORGANISASI

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi:
  - 1) Seksi Ketersediaan Pangan ;
  - 2) Seksi Sumber Daya Pangan;
  - 3) Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
  - 1) Seksi Distribusi Pangan;
  - 2) Seksi Harga Pangan;
  - 3) Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman pangan, membawahi:
  - 1) Seksi Konsumsi Pangan;
  - 2) Seksi Promosi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  - 3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
- f. Bidang Keamanan Pangan, membawahi:
  - 1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
  - 2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
  - 3) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Berau adalah tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan bertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, dengan struktur organisasinya pada Gambar 1 diatas.

## 2.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Pangan Kabupaten Berau per tanggal 31 Desember 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 51 orang terdiri dari PNS sebanyak 51 Orang dan Non-PNS sebanyak 6 orang (update thn 2018), dengan rincian :

- Pejabat struktural = 33 Orang
- Pejabat Fungsional (Penyuluh Pertanian Lapangan) = 0 Orang
- Staf Pelaksana = 18 Orang
- Pegawai Tidak Tetap (PTT) = 6 Orang
- Tenaga Harian Lepas Tenaga Pembantu Penyuluh (THL-TP) = 0 Orang

Berdasarkan kualifikasi pendidikannya dari 57 orang pegawai (PNS dan Non PNS update thn 2018) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	0
2	SMP	1
3	SLTA	11
4	DIPLOMA II/III (D-2 / D-3)	2
5	STRATA 1	36
6	STRATA 2	7
7	STRATA 3	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>57</b>

Berdasarkan kualifikasi jenis kelaminnya dari 57 orang pegawai (PNS dan Non PNS update thn 2018) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	Eselon			
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	23	4	26
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>33</b>

	Pejabat Fungsional			
4	Penyuluh Pertanian	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	0	0	0
	Staf Pelaksana			
5	Staf	14	4	18
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
	PTT			
6	Honorar	6	0	6
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	THL-TB & PMT			
7	THL-TB	0	0	0
8	PMT	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	0	0	0
	<b>Jumlah Total</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>57</b>

Berdasarkan Kepangkatan dan golongannya dari 51 orang yang berstatus PNS dapat dirinci sebagai berikut :

NO	Pangkat / Golongan	JUMLAH
1	Juru Muda/IA	-
2	Juru Muda TK. I/IB	-
3	Juru/IC	1
4	Juru TK. I/ID	-
5	Pengatur Muda/IIA	-
6	Pengatur Muda TK. I/IIB	1 Orang
7	Pengatur/IIC	2 Orang
8	Pengatur TK. I/IID	-
9	Penata Muda/IIIA	5 Orang
10	Penata Muda TK. I/IIIB	2 Orang
11	Penata /IIIC	10 Orang
12	Penata TK. I/IIID	20 Orang
13	Pembina /IVA	8 Orang
14	Pembina TK I/IVB	1 Orang
15	Pembina Utama Muda/IVC	1 Orang
16	Pembina Utama Madya/IVD	-
17	Pembina Utama/IVE	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>51 Orang</b>

Dinas Pangan Kabupaten Berau per tanggal 31 Desember 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 51 orang terdiri dari PNS sebanyak 51 Orang dan Non-PNS sebanyak 6 orang (update thn 2018), dengan rincian :

- Pejabat struktural = 33 Orang
- Pejabat Fungsional (Penyuluh Pertanian Lapangan) = 0 Orang
- Staf Pelaksana = 18 Orang
- Pegawai Tidak Tetap (PTT) = 6 Orang
- Tenaga Harian Lepas Tenaga Pembantu Penyuluh (THL-TP) = 0 Orang

Berdasarkan kualifikasi pendidikannya dari 57 orang pegawai (PNS dan Non PNS update thn 2018) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	0
2	SMP	1
3	SLTA	11
4	DIPLOMA II/III (D-2 / D-3)	2
5	STRATA 1	36
6	STRATA 2	7
7	STRATA 3	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>57</b>

Berdasarkan kualifikasi jenis kelaminnya dari 57 orang pegawai (PNS dan Non PNS update thn 2018) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	Eselon			
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	23	4	26
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>33</b>

	Pejabat Fungsional			
4	Penyuluh Pertanian	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Staf Pelaksana			
5	Staf	14	4	18
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
	PTT			
6	Honorer	6	0	6
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	THL-TB & PMT			
7	THL-TB	0	0	0
8	PMT	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>57</b>

Berdasarkan Kepangkatan dan golongannya dari 51 orang yang berstatus PNS dapat dirinci sebagai berikut :

NO	Pangkat / Golongan	JUMLAH
1	Juru Muda/IA	-
2	Juru Muda TK. I/IB	-
3	Juru/IC	1
4	Juru TK. I/ID	-
5	Pengatur Muda/IIA	-
6	Pengatur Muda TK. I/IIB	1 Orang
7	Pengatur/IIC	2 Orang
8	Pengatur TK. I/IID	-
9	Penata Muda/IIIA	5 Orang
10	Penata Muda TK. I/IIIB	2 Orang
11	Penata /IIIC	10 Orang
12	Penata TK. I/IIID	20 Orang
13	Pembina /IVA	8 Orang
14	Pembina TK I/IVB	1 Orang
15	Pembina Utama Muda/IVC	1 Orang
16	Pembina Utama Madya/IVD	-
17	Pembina Utama/IVE	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>51 Orang</b>

## SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas Pangan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat umum, petani dan pelaku agribisnis lainnya, untuk mewujudkan Visi Misi Bupati Berau dan Dinas Pangan sebagai pelaksana teknis dilapangan. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama barang	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak	%	
1.	Kantor Dinas	1 Unit	baik	-	80	Lokal Ruang msh kurang
2.	Ruang Rapat	1 Unit	baik	-	80	Bangunan dari kayu
3.	Kend.Roda 4	3 Unit	baik	-	80	Kurang 1 unit
4.	Kend Roda 2	43 Unit	40 unit	3 unit	50	Kurang 5 unit
5.	laptop	16 unit	10 unit	16 unit	50	Kurang 5 unit
6.	Komputer PC	15 Unit	10 Unit	5 unit	0	Kurang 10 unit
7.	Infokus	1 unit	1 unit	-	0	Merupakan alat bantu penyuluhan
8.	Meja	50 buah	50 buah	-	90	
9.	Kursi Eselon	23 buah	18 buah	5 buah	75	
10	Kursi lipat	32 buah	32 buah	-	85	
11.	Printer	15 unit	10 unit	5 unit	80	

### 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, **pasal 15 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf c**, pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala daerah Kepada DPRD, dan ILPPD Kepada Masyarakat Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf m urusan wajib Ketahanan Pangan, haruslah memuat laporan tentang penyelenggaraan urusan wajib Ketahanan Pangan dalam laporan tersebut.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditindaklanjuti melalui SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Berau.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, SKPD Dinas Pangan telah menetapkan Indikator Kinerja Pelayanan dalam Renstra SKPD Tahun 2016–2021, dengan berbagai perubahan yang telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Berikut ini adalah indikator yang dikembangkan, meliputi Indikator Standar Pelayanan Minimal (Permentan 65/2010), Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 54/2010), dan Indikator lain yang dikembangkan pada SKPD Dinas Pangan yaitu :

1. Ketersediaan energi dan protein per kapita
2. Penguatan Cadangan Pangan
3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
4. Stabilitas harga dan pasokan pangan
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
6. Neraca Bahan Makanan (NBM)
7. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
8. Penanganan Daerah Rawan Pangan
9. Regulasi ketahanan pangan
10. Ketersediaan Pangan Utama
11. Lumbung Pangan Desa
12. Desa Mandiri Pangan
13. Pemanfaatan pekarangan
14. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD selama tahun 2011 – 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan, adalah sebagai berikut :

- (1) Indikator kinerja pelayanan yang telah tercapai, adalah indikator kinerja dengan nilai capaian antara 75 – 100% terdiri dari 17 indikator atau 65,38% meliputi indikator ketersediaan energi dan protein per kapita; ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah; stabilitas harga dan pasokan pangan; Skor Pola Pangan Harapan (PPH); Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; penanganan daerah rawan pangan; regulasi ketahanan pangan; ketersediaan pangan utama; Pola Pangan Harapan; Fasilitas Penyuluhan ; Koordinasi Penyuluhan (PEDA/PENAS); Jumlah pelatihan bagi petani; jumlah pelatihan bagi penyuluh; dan Jumlah kebijakan ketahanan pangan.
- (2) Indikator kinerja pelayanan yang belum tercapai, adalah indikator kinerja dengan nilai capaian antara 50 – 74% terdiri dari 3 indikator atau 11,54% meliputi indikator koordinasi DKP; peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan jumlah kelembagaan BPP yang operasional.
- (3) Indikator kinerja pelayanan yang perlu mendapat perhatian khusus, adalah indikator kinerja dengan nilai capaian antara 5 – 49% terdiri dari 5 indikator atau 18,23% meliputi indikator penguatan cadangan pangan pemerintah; pengembangan lumbung pangan desa; desa mandiri pangan; penurunan kerawanan pangan dan jumlah kebijakan penyuluhan.
- (4) Permasalahan belum tercapainya indikator-indikator tersebut antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia, regulasi, dan koordinasi dengan lintas SKPD.

Rincian capaian indikator kinerja pelayanan SKPD Dinas Pangan Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pangan terutama dalam pencapaian indikator pembangunan ketahanan pangan, baik yang Indikator SPM, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator lain yang dikembangkan dalam rangka mengukur kinerja SKPD, sejak tahun 2011 – 2015 telah dialokasikan anggaran dan realisasi dengan rincian sebagaimana Tabel 2.3.2.

## Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pangan Kabupaten Berau

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target Restra SKPD Tahun					Realisasi Capaian SKPD Tahun					Total Capaian	
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%		85	87	88	89	90	101,70	122,59	181,22	135,52	132,59		
2	Penguatan Cadangan Pangan	%		45	47	50	55	60	0,94	4,79	63,06	10,06	22,18		
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%		70	75	80	85	90	72,48	77,01	83,30	85,20	98,29		
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%		90	90	90	90	90	100	100	90,09	91,38	110,49		
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%		65	70	75	85	90	62,78	92,83	93,35	96,91	90,15		
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%		60	65	70	75	80	0	87,50	93,65	100	100		
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%		22	35	45	50	60	21,74	50	66,67	100	100		
8	Regulasi ketahanan pangan		Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Perbup
9	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.067	35.380	44.776	43.172	34.401	187.796	
10	Lumbung Pangan Desa	Unit		2	2	2	2	2	1	2	2	1	0	6	
11	Desa Mandiri Pangan	kampung		1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	6	
12	Pemanfaatan pekarangan	KRPL		2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	7	
13	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	rapat		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh	org		10	10	10	10	10	2	10	6	6	10		
15	BOP Penyuluh	org		83	83	83	83	83	0	43	83	83	80		
16	Jumlah Pelatihan bagi petani	kali		5	5	5	5	5	2	3	5	5	6		
17	FasilitasiKelembagaanPetani	klp		10	10	10	10	10	5	8	10	10	10		
18	Jumlah kelembagaan BPP yang operasional	BPP		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
19	Jumlah Demplot yang dikembangkan	Demplot		10	10	10	10	10	13	10	7	8	8		

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pangan, meliputi:

#### **1) Belum Terpenuhinya Kebutuhan Pangan**

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan oleh gubernur dimana hingga saat ini program tersebut masih jauh dari harapan. Rata-rata hasil panen padi di Kabupaten Berau sebanyak 3,44 ton di setiap hektarnya di Tahun 2015. Sebagai bagian dari provinsi yang memiliki tujuan swasembada pangan, maka seyogyanya Kabupaten Berau memberikan kontribusi yang maksimal dalam memenuhi produksi tanaman pangan baik dengan cara pengembangan lahan atau penggunaan teknologi pertanian tepat guna.

Selain itu, produk pertanian lainnya perlu mendapat perhatian pemerintah dalam pengembangan maupun distribusinya di setiap wilayah Kabupaten Berau. Sedangkan komoditas-komoditas yang tidak diproduksi di Kabupaten Berau perlu mendapat sorotan untuk mulai mengoptimalkan sumber daya regional agar kebutuhan pangan tidak tergantung dari luar wilayah.

#### **2) Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,** produksi dan kapasitas produksi pangan mulai terbatas, karena :

1. Terjadinya konversi lahan produktif pangan ke penggunaan non pangan;
2. Tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi;
3. Terbatasnya lahan potensial yang difungsikan untuk produksi;
4. Rendahnya produktivitas pangan;
5. Terbatasnya jumlah petani dan kemampuan pengolahan lahan;
6. Terbatasnya bibit pangan (ternak, ikan, tanaman pangan);
7. Permintaan pangan semakin meningkat, seiring peningkatan jumlah
8. penduduk, kebutuhan baku industri pengolahan pangan, dan parawisata;

9. Hasil analisis, pengkajian dan penelitian pangan, belum dimanfaatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program dan kegiatan;

### 3) **Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan**

1. Belum memadainya sarana dan distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen antar wilayah, menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan, akibatnya kenaikan harga dan penurunan kualitas konsumsi pangan;
2. Biaya pemasaran menjadi mahal, produk susut dan rusak.
3. Melonjaknya harga pangan dunia, seperti beras dan kedelai.
4. Kondisi iklim yang tidak menentu.
5. Belum dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan oleh Pemerintah Daerah, terutama yang berkaitan dengan cadangan pangan pemerintah di daerah.
6. Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan up to date yang berkaitan dengan ketersediaan, harga pangan dan cadangan pangan.
7. Keterbatasan SDM dan kelembagaan ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.

### 4) **Penganeekaragaman, dan Pola Konsumsi Pangan**, kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH), sebagai akibat dari :

1. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga;
2. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran akan pangan dan gizi;
3. Kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan lokal;
4. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan informasi pengolahan pangan lokal;
5. Pengaruh nilai-nilai budaya dan kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

### 5) **Keamanan Pangan**, penanganan keamanan pangan dipengaruhi oleh :

1. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap keamanan pangan segar;

2. Cara-cara budidaya dan produksi pangan yang baik dan benar belum dipahami dan diterapkan;
3. Kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pangan belum optimal;
4. Buruknya sanitasi dan higiene peritel dalam menerapkan GRP;
5. Belum efektifnya pengawasan keamanan pangan, karena keterbatasan SDM dan standarisasi (pedoman);
6. Tidak tersedia dan terbatasnya Laboratorium yang terakreditasi di daerah;
7. Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar hukum dibidang pangan segar belum dilaksanakan;

#### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Berau. Dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap, secara umum masih cukup terbuka peluang potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi, dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk: *meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan peningkatan cadangan pangan; dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.*

Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

##### **1) Aspek Ketersediaan Pangan**

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Berau dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air

merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan.

Padi merupakan komoditas tanaman pangan utama yang dibudidayakan oleh para pelaku utama (petani) baik di lahan basah (padi sawah) maupun lahan kering (padi ladang). Perkembangan luas tanam, luas panen dan produksi padi sawah dan padi ladang dalam kurun waktu 2010-2015.

Data luas tanam padi (sawah + ladang) menunjukkan peningkatan seluas 2.963 ha atau meningkat 26,30 % yaitu dari 11.265 ha pada tahun 2010 menjadi 14.258 ha pada tahun 2014. Luas panennya (padi sawah + padi lading) meningkat 347 ha atau meningkat 2,59 % yaitu dari 13.389 ha pada tahun 2010 menjadi 13.737 ha pada tahun 2014. Selaras dengan peningkatan luas tanam dan luas panen, maka produksi padi (padi sawah + padi lading) juga mengalami peningkatan 4.114 ton atau meningkat 10,60 % yaitu dari 38.700 ton pada tahun 2010 menjadi 42.814 ton pada tahun 2014.

Sedangkan untuk kondisi tahun 2015 berdasarkan data angka sementara periode pertengahan tahun ( Januari – Juni ) untuk total padi sawah dan padi ladang luas tanam = 2.891 Ha dan luas panen = 11.403 Ha dengan total produksi = 32.630 ton

Potensi lahan pertanian tersebut, tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Berau, dan masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan daerah, dan menunjang pangan nasional. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan nasional, dapat ditempuh dengan langkah-langkah: pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi potensi lahan rawa dan air tanah.

Dengan potensi sumberdaya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan di Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau memiliki kekayaan keragaman hayati, tanaman penghasil buah, tanaman penghasil sayuran, tanaman berumbi, dan

tanaman rempah-rempah. Sumber karbohidrat lain seperti : jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan sagu. Beberapa diantaranya dari komoditi lokal tersebut yang dahulu menjadi makanan pokok di beberapa daerah di Kabupaten Berau, juga tidak lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu.

Potensi sumberdaya alam yang mengandung berbagai jenis sumberdaya hayati tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang waktu di semua wilayah. Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian sangat penting, artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi bahan pangan. Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan.

Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan, dan pemberdayaan peran penyuluhan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada :

- a. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan;
- c. Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan;
- d. Pemberdayaan penyuluh dan peningkatan kesejahteraan petani serta
- e. Pengembangan akses pangan wilayah dan rumah tangga, serta perseorangan.

## 2) Aspek Distribusi Pangan

Kabupaten Berau sebagai daerah yang daratannya bergelombang dan bergunung, pemukiman penduduknya tersebar tidak merata, mempunyai tantangan untuk dapat mendistribusikan bahan pangan secara tepat waktu sehingga tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan tersedia setiap saat.

Kawasan perbatasan, pedalaman dan kepulauan terpencil tantangan yang dihadapi adalah iklim yang kurang mendukung, terbatas sarana/prasarana yang memadai untuk transportasi, pasar dan sarana penyimpanan, dan informasi pasar.

Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka peran pemerintah adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab. Potensi masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana/prasarana distribusi antara lain jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan cukup besar dan sangat bervariasi dari yang bersifat individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga perusahaan besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain yaitu berperan pada :

- a. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah;
- b. Penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan system distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan;
- c. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat; serta
- d. Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah.

### 3) Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kabupaten Berau memiliki beberapa peluang dalam peningkatan konsumsi, dan keamanan pangan diantaranya adalah dengan adanya kekayaan sumber daya alam yang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik.

Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sementara itu, terdapat pula berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan desa, dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait, dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya). Kelembagaan ini dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Dinas Pangan memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada :

- a. peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan;

- b. penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan; serta
- c. pembinaan untuk pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
- d. Meningkatkan peran penyuluh didalam memasyarakatkan penganekaragaman dan diversifikasi pangan;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani didalam pengolahan pangan;

#### **4) Manajemen Ketahanan Pangan**

Kemampuan manajemen ketahanan pangan di kabupaten Berau, merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat daerah, rumah tangga, hingga perseorangan yang mencakup pada berbagai hal strategis, antara lain:

##### **a. Jaringan kerjasama dengan instansi terkait.**

Dinas Pangan, sudah membentuk Organisasi Dewan Ketahanan Pangan yang menangani ketahanan pangan. Seiring adanya kelembagaan tersebut, otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Untuk itu, Sekretariat DKP beserta jaringan pendukung ketahanan pangan, perlu lebih ditingkatkan kemampuannya untuk memantapkan program ketahanan pangan daerah.

##### **b. Kerjasama dengan swasta dan masyarakat.**

Meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, telah mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, halal, dan gizi pangan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dukungan informasi yang proaktif, akan mendorong peningkatan kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.

**c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.**

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil yang memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pelayanan tambahan sesuai dengan kondisi dan tuntutan daerah secara optimal di daerah kabupaten/kota di Kabupaten Berau.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi adalah untuk menemu kenali hasil inventarisasi permasalahan yang dikelompokkan pada permasalahan pokok. Guna identifikasi permasalahan ini adalah, sebagai acuan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat terkait dengan efektivitas peran lembaga dalam mendukung suksesnya tujuan ketahanan pangan, dan penyuluhan di Kabupaten Berau.

Dinas Pangan, memiliki 3 (tiga) tugas fokus, didalam pembangunan daerah di Kabupaten Berau, yaitu **ketahanan pangan, Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan**. Ketiga fokus tugas ini. Namun secara sinergis tugas-tugas ini diarahkan pada upaya pemenuhan ketersediaan konsumsi pangan yang cukup, ideal dan berkelanjutan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi perseorangan, baik secara kuantitas maupun kualitas, terjangkau, merata, beragam, bergizi berimbang, dan aman. Untuk dapat memenuhi sasaran ini, maka beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah : aspek – aspek ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan (konsumsi), bidang-bidangnya tidak saja teknis penyediaan (sektoral), tetapi juga ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Persoalan ketahanan pangan bukan hanya ketersediaan, terutama pemenuhan kebutuhan daerah, tetapi juga bagaimana rumah tangga mampu menyediakan pemenuhan konsumsi keluarga, dan bagaimana perseorangan mampu memanfaatkan pangan yang tersedia secara tepat yaitu memenuhi kebutuhan pangan yang ideal, seperti tercakup dalam Pola Pangan Harapan (PPH) ideal, yaitu keseimbangan terpenuhinya kebutuhan makro, agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif dari hari ke hari. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, dipenuhi melalui konsumsi energi (karbohidrat), zat pembangun (protein hewani), dan vitamin/mineral rata-rata sebesar 2.000 kkal/kapita/hari.

Fokus perhatian ketersediaan bukan hanya pada level daerah tetapi pada keluarga bagaimana keluarga mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan keluarga yang cukup, ideal dan aman. Dengan demikian, persoalan distribusi juga menjadi perhatian. Tercapainya ketersediaan pangan dalam lingkup daerah, belum menjamin seluruh rumah tangga dan perseorangan otomatis terpenuhi kebutuhan konsumsinya, demikian pula dengan terpenuhinya pangan keluarga, tidak secara otomatis memenuhi kebutuhan zat-zat makro dan mikro perseorangan terpenuhi.

Dengan demikian faktor-faktor jarak, kemampuan sosial, dan ekonomi keluarga, dan kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memenuhi ketahanan pangan daerah. Faktor jarak, adalah kemudahan keluarga dalam mengakses pemenuhan kebutuhan pangan, sedangkan kemampuan sosial-ekonomi, adalah hubungan kedekatan keluarga dengan sumber pangan, dan tingkat pendapatan yang diperoleh sebagai biaya yang diperlukan untuk membeli keperluan pangan, sedangkan kebijakan adalah keberpihakan pemerintah dalam pemenuhan pangan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Dinas Pangan adalah seperti tabel berikut.

Tabel 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pangan Kabupaten Berau.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Stand ar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan
			INTERNAL (KEWENANGAN DINAS PANGAN)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DINAS PANGAN)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketersediaan	Ketersediaan bahan pangan lokal, masih terbatas beras 21.586 ton, jagung 1.208 ton, kedelai	SPM	Menginformasikan, mendorong formulasi	Penyediaan produk lokal kewenangan Dinas Teknis di	Perencanaan ketersediaan oleh pelaksana belum

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan
			INTERNAL (KEWENANGAN DINAS PANGAN)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DINAS PANGAN)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	506 ton, kacang tanah 196 ton, kacang hijau 45 ton, ubi jalar 454 ton, singkong 2.091 ton, sayuran 644 ton. buah 4.696 ton, Daging 4.084 ton, dan telur 7.849 ton serta ikan 9.650. Untuk penyediaan beras pemerintah daerah belum ada		kebijakan penyediaan sesuai kebutuhan; Mendukung pengembangan Demapan, Lumbung	Kabupaten Berau, penyediaan Import oleh Perindag dan Swasta;	dilakukan berdasarkan aturan kecukupan pangan;
Kerawanan Pangan	Daerah-daerah sangat rawan pangan 12 Kampung dan Daerah yang telah ditangani 12 kampung. Capaian 100 % Daerah-daerah sangat rawan dan rawan tersebar di daerah-daerah pedalaman.	SPM	Merumuskan, merencanakan, mendukung dan membina bidang ketersediaan, konsumsi, pelatihan;	Bantuan beras miskin (raskin) kepada rumah tangga miskin, dan individu;	Konsep penanganan daerah kerawanan pangan belum mantap, dan informasinya belum akurat
Distribusi dan harga	Kendala kondisi fisik dan terbatasnya transportasi, serta jarak menyebabkan bahan-bahan pokok masih tinggi. pencapaian indikator Stabilitas Pasokan Bahan Pangan Startegis sampai dengan pada tahun 2015 sebesar 100 %	SPM	Koordinasi dan pemantauan, serta masukan tindakan;	Perindagkop, dan Bulog Kabupaten Berau.	Penyelenggaraan distribusi oleh instansi lain, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar
Konsumsi	1. Pencapaian kecukupan energi sebesar 2.387 kkal/kap/hari, prosentase pemenuhan energy 108,52%, 2. protein 89,30 gr/kap/hari, prosentase pemenuhan protein 156,67 % dan 3. pola pangan harapan 90,15 %	SPM	Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina P2KP,	Seluruh rumah tangga dan individu di Kab. Berau;	Konsep pola pangan harapan, dan pola pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman belum dipahami dan dilaksanakan;
Pangan ekaragam dan Diversifikasi Konsumsi	Konsumsi masih tandai dengan besarnya konsumsi beras, sedangkan pangan alternative masih rendah. Demikian pula konsumsi sayuran dan buah-buahan rendah kecuali ikan.	SPM	Pembentukan kelompok, membantu pembiayaan Mengkoordinasikan, mengendalikan dan	Tim PKK Kabupaten, seluruh rumah tangga dan individu di Kab. Berau;	Pangan merupakan kebiasaan dan budaya, oleh karena itu perubahan pangan alternative,

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan
			INTERNAL (KEWENANGAN DINAS PANGAN)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DINAS PANGAN)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Capaian sayur-sayuran thn 2015 sebesar 644 ton, atau skor PPH 16,5		membina P2KP di kabupaten Berau		dan mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok dan pengembangan kawasan pangan di daerah perlu terus dikembangkan ;
Keamanan Pangan	Pada tahun 2015 kegiatan pengambilan dan pengujian sampel pangan segar yang dilakukan sebanyak 52 sampel (contoh uji) jenis komoditas sayur-sayuran (kubis, sawi, kacang panjang, tomat, kangkung, labu putih, buncis) dan buah-buahan yang diambil dari petani di 12 Kecamatan. seluruhnya dinyatakan aman, capaian indicator SPM 100 %	SPM	Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, merekomendasikan dan membina produsen produk segar;	Menindak, pelanggar dan mengendalikan lembaga diluar Dinas Pangan;	Mendorong tumbuh dan berkembangnya kepedulian dan dukungan para produsen tentang perlunya keamanan pangan; Waktu pemeriksaan sample masih lebih dari 2 x 24 jam;

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau,serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi dan misi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

### **Visi Kepala Daerah**

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN.**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan,berikut ini adalah Misi ke 2 yang akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di tingkat SKPD.

**Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Capaian Awal 2015	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersedian pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan bagi masyarakat	Jumlah ketersediaan pangan bagi masyarakat							
2		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan jumlah desa rawan pangan							

### **3.3. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim**

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan tujuan :

1. Mewujudkan penyusunan kebijakan pangan dan pengelolaan pangan terpadu;
2. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian ketahanan pangan;
3. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pangan;
4. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan pangan;
5. Meningkatkan kemandirian pangan yang berbasis rumah tangga yang berkelanjutan;

#### **Sasaran yang ingin dicapai dalam :**

1. Terwujudnya kebijakan pangan terpadu;
2. Meningkat dan terkendalinya pelaksanaan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya melalui perwujudan:
  - 1) Meningkatnya integrasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan ketahanan pangan
  - 2) Meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan pangan ;
  - 3) Meningkatnya partisipasi petani/nelayan dalam pembangunan pangan;
4. Terwujudnya dukungan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, melalui pencapaian:
  - 1) Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan : Ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
  - 2) Menurunnya jumlah status daerah rawan pangan (Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 0,5% setiap tahun;
  - 3) Terdistribusi dan meningkatnya akses pangan masyarakat ;  
Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga

stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat di 3 sentra distribusi;

- 4) Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan Pokok Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah di 10 Kabupaten/Kota, serta terbangun dan berkembangnya lumbung sebanyak 30 unit sampai tahun 2021 di 30 Desa.
5. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan (Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari; Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2013 sebesar 91,50 ; Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
6. Meningkatnya pengembangan kemandirian pangan berkelanjutan, melalui pencapaian:
  - 1) Menumbuh kembangkan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian;
  - 2) Peningkatan Kompetensi kerja aparatur dan kompetensi non aparatur pertanian, perikanan dan kehutanan;

Langkah – langkah kebijakan :

- 1). Pemantapan ketersediaan pangan;
- 2). Pemantapan sistem dan distribusi pangan yang efisien dan efektif;
- 3). Pembinaan konsumsi pangan, beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat;
- 4). Pembinaan keamanan pangan segar; dan
- 5). Penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif;

Dengan Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 – 2018 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pada tahun 2013 yang merupakan masa peralihan, pelaksanaan program masih mengacu pada Renstra BKP 2009-2013, yaitu : Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan Program Penerapan Pemerintahan yang Baik. Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, ketersediaan pangan, distribusi pangan dan pemberdayaan ditingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Adapun indikator program (outcome) yaitu: (1) Prosentase realisasi pengembangan desa mandiri pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan; (2) Prosentase realisasi penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat; (3) Prosentase realisasi gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan dalam peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang, serta (4) Prosentase realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan. Adapun indikator program (outcome) yaitu: (1) Prosentase realisasi pengembangan desa mandiri pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan; (2) Prosentase realisasi penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat; (3) Prosentase realisasi gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan dalam peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang, serta (4) Prosentase realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan.

Instansi/ Lembaga	Visi	Misi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi	<b>“ Menjadi Lembaga Tangguh dan Aspiratif Dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendukung Formulasi kebijakan ketahanan pangan;.</li> <li>2) Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Ketahanan Pangan;.</li> <li>3) Melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Ketahanan Pangan</li> <li>4) Meningkatkan Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan.</li> <li>5) Mendorong berkembangnya kemandirian pangan berkelanjutan.</li> <li>6) Mendorong peran penyuluh yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, nelayan dan kehutanan</li> </ol>	<p>Program : Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</p> <p>Kegiatan 1. Diversifikasi Pangan 2. Pengembangan Lumbung Pangan 3. Pengembangan KRPL</p> <p>Program : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>Kegiatan 1 : Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian</p> <p>Kegiatan 2 : Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Indeks Ketahanan Pangan Daerah.</li> <li>2) Jumlah Penganekaragaman pangan lokal.</li> <li>3) Jumlah Kelompok KRPL.</li> <li>4) Jumlah Lumbung pangan Masyarakat yang dibangun dan diberdayakan.</li> <li>5) Persentasi Kelompok Tani yang didampingi;</li> <li>6) Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih</li> <li>7) Jumlah kelembagaan petani yang dibina dan diberdayakan</li> </ol>

### 3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan penjabaran dari pemecahan masalah yang dihadapi secara objektif, sehingga perumusan permasalahan dan tantangan yang terjadi pada masa dahulu, masa sekarang dan yang akan datang dapat diformulasikan menjadi isu-isu strategis yang dihadapi dan dianalisis secara objektif untuk dapat diatasi.

Ada 10 (sepuluh) isu sentral yang diusung oleh Gubernur terpilih periode 2013-2018 yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu *Cadangan Pangan*. Kemandirian pangan daerah merupakan kemampuan daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya pangan daerah, dengan ukuran besarnya ketergantungan dari daerah lain (impor) terhadap ketersediaan pangan.

Untuk perumusan isu – isu strategis urusan ketahanan pangan dan penyuluhan dilakukan melalui tahapan – tahapan penentuan kriteria isu-isu strategis, penjabaran dan analisis. Tabel 3.5.1 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	18
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	19
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
7	Urgensi isu terhadap isu lain	8
	Total	100

Tabel 3.5.2. Penilaian Skala Kriteria Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Bersumber Produk Lokal.	10	10	15	9	5	15	8	-42
2.	Pencegahan Kerawanan Pangan.	10	10	15	10	4	16	8	72
3.	Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	15	10	12	8	6	16	8	73
4.	Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah dan Masyarakat.	10	10	15	7	8	17	8	75
5.	Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Panganekaragaman Konsumsi.	15	8	12	10	8	12	7	75
6.	Mendorong Pengembangan Fasilitas UMKM.	10	5	15	8	7	17	7	72
7.	Pengembangan B2SA Terpadu.	10	9	15	10	8	14	8	69
8.	Peningkatan Keamanan Pangan.	10	8	15	9	6	14	7	74
9.	Peningkatan Jumlah dan Kemampuan Penyuluh, serta Pelatihan SDM.	15	9	16	9	7	15	8	69
10.	Kelembagaan dan Manajemen ketahanan Pangan dan penyuluhan.	15	10	18	10	9	17	9	79

Tabel 3.5.3. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemenuhan Ketersediaan Pangan Bersumber Produk Lokal.	42	6.00
2.	Pencegahan Kerawanan Pangan.	72	10.29
3.	Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	73	10.43
4.	Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah dan Masyarakat.	75	10.71
5.	Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Panganekaragaman Konsumsi.	75	10.71
6.	Mendorong Pengembangan Fasilitas UMKM.	72	10.29
7.	Pengembangan B2SA Terpadu.	69	9.86
8.	Peningkatan Keamanan Pangan.	74	10.57
9.	Kelembagaan dan Manajemen ketahanan Pangan dan penyuluhan.	79	11.29
10.	Penyuluhan, mutu dan keamanan pangan	75	10.5

### 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan penjabaran dari pemecahan masalah yang dihadapi secara objektif, sehingga perumusan permasalahan dan tantangan yang terjadi pada masa dahulu, masa sekarang dan yang akan datang dapat diformulasikan menjadi isu-isu strategis yang dihadapi dan dianalisis secara objektif untuk dapat diatasi, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi hingga saat ini oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. **Pemenuhan Ketersediaan Pangan Bersumber Produk Lokal.** Ketersediaan pangan yang bersumber dari produk lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan perseorangan yang semakin meningkat terbatas;
2. **Pencegahan Kerawanan Pangan.** Upaya pencegahan kerawanan pangan masih terbatas, karena Peta kerawanan dan hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik, serta kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi;
3. **Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat.** Kurang lancarnya penyelenggaraan Distribusi, menghambat transportasi angkutan pangan, yang berakibat tingginya biaya transportasi dan harga pangan, akibatnya aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun;
4. **Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah dan Masyarakat.** Belum semua daerah kabupaten/ kota menyediakan pangan pemerintah dan mendorong tersedianya lumbung pangan masyarakat;
5. **Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi.** Terbatasnya pembinaan dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi sebagai sumber pengetahuan dan himbauan tumbuhnya kesadaran masyarakat, menyebabkan diversifikasi pangan dalam upaya memenuhi pola konsumsi, beragam, bergizi, dan berimbang yang berbasis sumber daya lokal belum optimal.

6. **Mendorong Pengembangan Fasilitas UMKM.** Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu mendorong pengembangan penganekaragaman konsumsi, masih terkendala terbatasnya fasilitas pengembangan usaha;
7. **Pengembangan B2SA Terpadu.** Untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya pola konsumsi, beragam, bergizi, dan berimbang yang berbasis sumber daya lokal, maka perlu dilakukan secara terpadu mulai produksi, paska panen dan menu yang cocok untuk di sosialisasikan, sementara itu informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal masih terbatas.
8. **Peningkatan Keamanan Pangan.** Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pola hidup sehat, dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan menuntut akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan keamanan pangan;

### 3.6. KEBIJAKAN

Pembangunan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti walaupun telah ditetapkan tujuan berikut indikator keberhasilannya apabila tidak didukung dengan strategi pencapaian tujuan yang tepat.

Maka dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Berau, Dinas Pangan telah menetapkan strategi pencapaian dengan kebijakan sebagai berikut :

No	KEBIJAKAN
1	Pengembangan sistem informasi pembangunan pertanian yang menunjang ketahanan pangan
2	Pengembangan sistem informasi pembangunan bidang pertanian
3	Mengembangkan usaha pengolahan produksi hasil pertanian
4	Memfasilitasi dan membina desa mandiri pangan
5	Penguatan modal usaha lembaga distribusi pangan masyarakat dan lembaga usaha ekonomi pedesaan
6	Penganekaragaman dan pemanfaatan pangan berbasis bahan lokal
7	Pengembangan lumbung pangan masyarakat pedesaan
8	Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan
9	Persediaan Pangan di desa, Kecamatan dan Kabupaten
10	Pengembangan kemandirian pangan di perdesaan
11	Peningkatan penerapan teknologi bagi petani untuk dapat berusaha tani yang baik dan benar untuk mendukung ketahanan pangan
12	Peningkatan kemitraan agribisnis pangan
13	Peningkatan pemasaran produk pangan

1. Ketahanan Pangan menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Indikator kinerja ketahanan pangan didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor: 65/permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar pelayanan minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Program strategis dalam renstra mengacu pada RPJMD adalah program peningkatan ketahanan pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
4. Kegiatan strategis dalam renstra yang mengacu pada RPJMD 2016 – 2021 dengan jumlah mencapai 30 kegiatan strategis.

## **BAB IV.**

### **VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 VISI DAN MISI SKPD**

##### **1) Rumusan Visi**

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Pangan Kabupaten Berau, perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pangan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau mufakat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pangan Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Berau yaitu :

***” MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN.”***

Sehingga Visi Dinas Pangan Kabupaten Berau adalah :

<p><b><i>”Terwujudnya Masyarakat Pertanian Yang Sejahtera dan Berdaya Saing Menuju Kemandirian Pangan Daerah”</i></b></p>
---

Penjelasan kata kunci "Visi" di atas sebagai berikut :

1. **Terwujudnya masyarakat pertanian yang Sejahtera** mengandung makna masyarakat sudah mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dalam rangka meningkatnya produksi, mantapnya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi pedesaan, memiliki kekuatan modal usaha dan akses perbankan dan mampu mengakses informasi dan berkomunikasi dalam mengembangkan jejaring agribisnis.
2. **Berdaya Saing mengandung Makna** Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat. Kemampuan ini yang akan memberikan manfaat kepada suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan.
3. **Kemandirian pangan daerah** mengandung makna bahwa suatu kondisi ketersediaan dan cadangan pangan yang cukup dan distribusi pangan yang merata serta harga pangan yang terjangkau di Kabupaten Berau.

Sebagai sarana untuk menyederhanakan VISI tersebut, disamping juga untuk menjadikan VISI sebagai sesuatu yang mudah dimengerti dan menjadi slogan yang terus menerus dapat diingat oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Berau.

Dinas Pangan Kabupaten Berau menyadari bahwa kedepan dengan pernyataan visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Berau. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi Dinas Pangan Kabupaten Berau bersama-sama pihak berkepentingan lainnya untuk merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang, juga dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan di Kabupaten Berau.

## 2) Rumusan Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pangan ditetapkan *misi* yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu tertentu. *Misi* tersebut merupakan kegiatan bidang Ketahanan Pangan yang meliputi petani, masyarakat pertanian, kelembagaan sosial– ekonomi petani dan instansi terkait lainnya. Rumusan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi Dinas Pangan adalah :

1. Mendukung Formulasi kebijakan ketahanan pangan;
2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian pangan;
3. Melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pangan;
4. Meningkatkan Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan;
5. Mendorong berkembangnya kemandirian pangan berkelanjutan;

Misi RPJMD	Misi Dinas Pangan
Misi 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendukung Formulasi kebijakan ketahanan pangan;</li><li>2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian pangan;</li><li>3. Melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pangan;</li><li>4. Meningkatkan Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan;</li><li>5. Mendorong berkembangnya kemandirian pangan berkelanjutan;</li></ol>

Hal ini searah dengan penjelasan *misi ke 2 RPJMD Kabupaten Berau* yaitu: Meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Berau dengan cara memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh sector industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus memerhatikan sector industri yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri. Pemerintah Kabupaten Berau juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industry berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industry kecil menengah berbasis kerakyatan.

Pengembangan masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan menuju suatu kondisi yang lebih baik. Pengembangan ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang memengaruhi perekonomian masyarakat adalah ketersediaan sumber daya alam. Sumberdaya yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat akan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan taraf ekonomi apabila dapat dikelola dengan baik. Potensi sumberdaya alam yang diimbangi dengan sumberdaya manusia akan mampu menghasilkan suatu produksi yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran**

### **1) Tujuan**

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Berau untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan tujuan :

6. Mewujudkan penyusunan kebijakan pangan secara terpadu;
7. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pangan;
8. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pangan;
9. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan pangan;
10. Meningkatkan kemandirian pangan yang berbasis rumah tangga yang berkelanjutan;

### **2) Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

7. Terwujudnya kebijakan pangan melalui regulasi daerah;
8. Meningkat dan terkendalinya ketahanan pangan di daerah;
9. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya melalui perwujudan:

- 4) Meningkatnya integrasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pangan
  - 5) Meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan pangan yang berkelanjutan;
  - 6) Meningkatnya partisipasi petani/nelayan dalam pembangunan pangan;
10. Terwujudnya dukungan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, melalui pencapaian:
- 5) Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan : Ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
  - 6) Menurunnya jumlah status daerah rawan pangan (Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 0,5% setiap tahun;
  - 7) Terdistribusi dan meningkatnya akses pangan masyarakat ; Terpantaunya distribusi pangan yang lancer sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat di 3 sentra distribusi;
  - 8) Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan Pokok Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Berau, serta terbangun dan berkembangnya lumbung sebanyak 10 unit sampai tahun 2021 di 10 Kampung/Desa.
11. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan (Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari; Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2015 sebesar 91,50 ; Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;

12. Meningkatnya pengembangan kemandirian pangan berkelanjutan, melalui pencapaian:

- 3) Menumbuhkembangkan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian;
  - a) Fasilitas penumbuhan 500 Kelompok Tani dengan program pemberdayaan petani.
  - b) Meningkatnya peran kelembagaan 11 BPP penyuluhan pertanian, Perkebunan dan perikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
- 4) Peningkatan Kompetensi kerja aparatur dan kompetensi non aparatur;
  - a) Meningkatkan kemampuan aparatur pelaksana peningkatan ketahanan pangan;
  - b) Peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku usaha;

Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pada masyarakat.
2. Tercapainya distribusi pangan yang lebih cepat sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat
3. Berkurangnya ketergantungan terhadap pangan pokok (beras)
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola ketahanan pangan
5. Berkembangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, petani, dan pelaku agribisnis lainnya yang berkompeten, kreatif, inovatif, dan berwawasan luas.
6. Terberdayakannya kelembagaan petani dan pelaku usaha agribisnis lainnya agar menjadi kelembagaan ekonomi kampung yang tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi.
7. Tumbuh dan berkembangnya jaringan kerjasama antara kelembagaan petani/nelayan dan pelaku usaha agribisnis
8. Termotivasinya masyarakat agribisnis lebih maju, inovatif dan kreatif dalam mengelola usaha mereka yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan bagi masyarakat	Indeks Ketahanan pangan daerah	75 %	76.5 %	78 %	79.5%	81%	82.5%
2			Jumlah ketersediaan pangan utama (pokok) (Kg/kapita/thn) -beras (ton) -jagung (ton) -kedelai (ton) -ubi kayu (ton) -ubi jalar (ton)	124 Kg/kapita/thn	130 Kg/kapita/thn	135 Kg/kapita/thn	140 Kg/kapita/thn	155 Kg/kapita/thn	155 Kg/kapita/thn

## **BAB V.**

### **PROGRAM KEGIATAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **1.1 Program SKPD**

Sebagai Pedomoman dalam melaksanakan kegiatan, maka untuk tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pangan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Berau, telah disusun program peningkatan ketahanan pangan. Adapun kegiatan-kegiatan yang menunjang terhadap program tersebut yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

#### **1.2. Program Lintas SKPD**

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

#### **1.3. Program Lintas Kewilayahan**

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

#### **1.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan**

Dalam upaya mencapai hasil dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Pangan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Berau ditetapkan Rencana Program dan Kegiatan Indikatif tahun 2016-2021

Terlampir.....

No	PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016-2021	JUMLAH DANA s/d 2021 (Rp.)
(1)	(2)	(3)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>8,820,500.000,-</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,000.000,-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400,000.000,-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,460,000.000,-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,350,000.000,-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29,500.000,-
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	55,000.000,-
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	210,000.000,-
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	61,000.000,-
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	30,000.000,-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	670,000.000,-
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,000.000,-
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	74,000.000,-
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	300,000.000,-
14	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	2,100,000.000,-
15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah	900,000.000,-
16	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1,140,000.000,-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>860,000.000,-</b>
17	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	420,000.000,-
18	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	440,000.000,-
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>70,000.000,-</b>
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	70,000.000,-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>870,000.000,-</b>
20	Pendidikan dan Pelatihan Formal	870,000.000,-
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>2,263,000.000,-</b>
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	375,000.000,-
22	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	425,000.000,-
23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	830,000.000,-
24	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	83,000.000,-
25	Konsolidasi, Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Pangan	550,000.000,-
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>8,900,000.000,-</b>
26	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	2,500,000.000,-
27	Penyuluhan dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis	2,800,000.000,-
28	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	3,100,000.000,-
29	Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan Segar bagi masyarakat	500,000.000,-
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)</b>	<b>20,160,090.000,-</b>
28	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	1,350,000.000,-
29	Analisis RasioJumlah Penduduk TerhadapJumlah Kebutuhan Pangan	1,250,000.000,-
30	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	2,500,000.000,-
31	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	950,000.000,-
32	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	950,000.000,-
33	Pengembangan cadangan pangan daerah	750,090.000,-

No	PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016-2021	JUMLAH DANA s/d 2021 (Rp.)
(1)	(2)	(3)
34	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	1,300,000,000,-
35	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	2,750,000,000,-
36	Koordinasi Kebijakan Perberasan	1,200,000,000,-
37	Diversifikasi Pangan Lokal	2,350,000,000,-
38	Peningkatan Pembinaan Daerah Rawan Pangan	1,850,000,000,-
39	Peningkatan Kewaspadaan, Mutu dan Keamanan Pangan	1,500,000,000,-
40	Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan	1,460,000,000,-
41	Konsolidasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pangan	370,000,000,-
42	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	400,000,000,-
43	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Pangan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida	700,000,000,-
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>3,050,000,000,-</b>
44	Fasilitasi kerjasama/regional Nasional penyediaan hasil produksi /perkebunan komplementer	1,550,000,000,-
45	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	1,500,000,000,-
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN</b>	<b>25,050,000,000,-</b>
46	Peningkatan Penyediaan Bahan-Bahan Pelaksanaan Metodologi Sarana dan Prasarana Penyuluhan	2,350,000,000,-
47	Sinkronisasi Perencanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	1,200,000,000,-
48	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	4,000,000,000,-
49	Pengembangan BPP Model	2,500,000,000,-
50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan	9,000,000,000,-
51	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Banprov	6,000,000,000,-
	<b>JUMLAH</b>	

PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN STRATEGIS
<b>DINAS PANGAN DAN UPTB</b>	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> <li>- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</li> <li>- Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor</li> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>- Rapat-rapat Koordinasi &amp; Konsultasi ke Luar Daerah</li> <li>- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah</li> <li>- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran</li> </ul>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</li> <li>- Pengadaan Kendaraan Operasional</li> </ul>
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya</li> </ul>
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Formal</li> </ul>
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>- Sosialisasi Kinerja Program SKPD</li> <li>- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</li> <li>- Konsolidasi, Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Pangan</li> </ul>

Program Strategis	KegiatanStrategis
<b>DINAS PANGAN KABUPATEN BERAU</b>	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis</li> <li>- Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis</li> <li>- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani</li> <li>- Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan Segar bagi masyarakat</li> </ul>
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan</li> <li>- Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan</li> <li>- Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan</li> <li>- Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat</li> <li>- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok</li> <li>- Pengembangan cadangan pangan masarakat</li> <li>- Pengembangan Desa Mandiri Pangan</li> <li>- Pengembangan Lumbung Pangan Desa</li> <li>- Koordinasi Kebijakan Perberasan</li> <li>- Diversifikasi Pangan Lokal</li> <li>- Peningkatan Pembinaan Daerah Rawan Pangan</li> <li>- Peningkatan Kewaspadaan, Mutu dan Keamanan Pangan</li> <li>- Peningkatan peran dewan ketahanan pangan</li> <li>- Konsolidasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pangan</li> <li>- Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Produksi Pangan,</li> </ul>

	Penggunaan Pupuk dan Pesticida
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi kerjasama/regional Nasional penyediaan hasil produksi /perkebunan komplementer</li> <li>- Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah</li> </ul>
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Penyediaan Bahan-bahan Pelaksanaan Metodologi Sarana dan Prasarana Penyuluhan</li> <li>- Sinkronisasi Perencanaan Penyelenggaraan Penyuluhan</li> <li>- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian</li> <li>- Pengembangan BPP Model</li> <li>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan</li> <li>- Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Bantuan Provinsi</li> </ul>

Sedangkan rencana program dan kegiatan strategis UPTD sebagaimana terinci dalam Tabel berikut.

Program Strategis	Kegiatan Strategis
Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD)	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	- Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan	- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian

## 5.1. Indikator Kinerja SKPD

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pangan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, maka sesuai tujuan dan sasaran strategis, maka indikator kinerja SKPD selain didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga di dasarkan pada indikator yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD.

Indikator kinerja SKPD Dinas Pangan adalah :

### I. Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Indek ketahanan pangan daerah (% per tahun)
2. Jumlah ketersediaan pangan utama (pokok) (Kg/kapita/thn)

### II. Indikator Program adalah :

- 1) Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik (%)
- 2) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal (%)
- 3) Persentase kedisiplinan aparatur (%)
- 4) Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya (%)
- 5) Nilai Lakip (Skor)
- 6) Persentase kelompok tani yang di dampingi. (%)
- 7) Jumlah ketersediaan pangan bagi masyarakat (Ton)
- 8) Persentase Hasil Pertanian yang dipasarkan (%)
- 9) Jumlah penyuluh pertanian berkualitas (org)

### III. Indikator Kegiatan Strategis adalah:

- 1) Jumlah Surat yang bermaterai dan yang berperangko (lembar)
- 2) Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, Oli dan yang mendapat BBM
- 4) Jumlah bulan Pengelolaan administrasi keuangan, Perencanaan, Barang
- 5) Jumlah gedung yang dibersihkan
- 6) Jumlah peralatan yang diperbaiki
- 7) Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor
- 8) Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan surat dan dokumen lainnya

- 9) Jumlah komponen listrik /penerangan bangunan kantor
- 10) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
- 11) Jumlah peralatan Rumah tangga yang disediakan
- 12) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan setiap bulan
- 13) Jumlah makanan dan minumam
- 14) Jumlah orang untuk Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 15) Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah kab. Berau
- 16) Jumlah Tenaga Administrasi /teknis perkantoran yang tersedia
- 17) Jumlah gedung kantor yang di Rawat
- 18) Jumlah gedung kantor yang di Sewah
- 19) Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
- 20) Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan
- 21) Jumlah laporan kinerja keuangan
- 22) Persentase kinerja program SKPD
- 23) Jumlah Program kegiatan yang di Monev
- 24) Jumlah dokumen/ laporan perencanaan dan keuangan SKPD
- 25) Jumlah Dokumen Perencanaan Program kegiatan
- 26) Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih
- 27) Jumlah Kelompok Tani dan pelaku agribisnis yang didampingi
- 28) Jumlah Kelembagaan petani dan nelayan yang dibina dan diberdayakan
- 29) Jumlah Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
- 30) Jumlah Analisis pola konsumsi pangan dan Suplai pangan
- 31) Jumlah analisis rasio kebutuhan pangan
- 32) Jumlah Kelompok Rumah Pangan Lestari
- 33) Jumlah analisis akses pangan daerah
- 34) Jumlah analisis harga pangan pokok daerah
- 35) Jumlah Cadangan Pangan Daerah
- 36) Jumlah pendampingan Desa Mandiri Pangan
- 37) Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun dan dikembangkan
- 38) Jumlah koordinasi kebijakan pengamanan stok pangan
- 39) Jumlah diversifikasi pangan yang dikembangkan
- 40) Jumlah daerah rawan pangan yang teridentifikasi
- 41) Jumlah pengujian sampel pangan segar

- 42) Jumlah pertemuan dewan ketahanan pangan
- 43) Jumlah Program Kegiatan yang direncanakan
- 44) Jumlah Kelompok yang didampingi
- 45) Jumlah Pembinaan dan Pengawasan
- 46) Jumlah kelompok agribisnis yang dibina
- 47) Jumlah pelaksanaan Promosi produk pertanian unggulan daerah
- 48) Jumlah Kaji Terap yang difasilitasi
- 49) Jumlah dokumen, Perencanaan program penyuluhan
- 50) Jumlah penyuluh yang dilatih
- 51) Jumlah UPTD model yang difasilitasi
- 52) Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang di Bangun/ diadakan dan  
Jumlah Sarana Pendukung Penyuluhan yang di diadakan
- 53) Jumlah penyuluh yang difasilitasi BOPnya

## **5.2. Kelompok Sasaran**

Sasaran kelompok untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan periode 2016 - 2021 adalah :

- a) Kelompok dan Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan)
- b) Kelompok Tani (Poktan)
- c) Kelembagaan Penyuluhan (UPTD)
- d) Kelompok Wanita Tani (KWT)
- e) Rumah Tanggah
- f) Produsen Pangan Segar
- g) Konsumen dalam negeri
- h) Masyarakat Rawan Gizi
- i) Masyarakat rawan pangan
- j) Anak Busung Lapar dan Stunting

## **5.3. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai atau mempertahankan indikator kinerja Dinas Pangan di atas berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah menurut undang-undang.

Pendanaan indikatif dari sumber APBD Kabupaten Berau, APBN dan Sumber Lainnya yang sah melalui Belanja Langsung direncanakan sebagaimana rincian tabel Lampiran 1 (terlampir) Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Berau.

## **BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan, secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Berau tahun 2016- 2021 dapat dilihat pada uraian dalam tabel 9.1 RPJMD Kab. Berau. Adapun indikator kinerja SKPD yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap  
Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Berau  
(sumber RPJMD Kab. Berau Bab IX hal 6)**

**Sebelum Revisi RPJMD**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Data Awal	Data Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>								
I	Fokus Layanan urusan Wajib							
....	....							
<b>1.10</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>							
1.10.1	Jumlah produksi padi (ton)	Ton	40,794	57,897.00	62,172.75	66,448.50	70,724.25	75,000.00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Data Awal	Data Capaian	
				2017	2021
<b>1.10</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>				
1.10.1	Ketersediaan Energi	(KKal/Kapita/Hari)	2.200	2.300	2.400
	Jumlah kelompok tani yang direvitalisasi	(kelompok)	75	50	250
	Jumlah Penyuluh Lapangan yang direvitalisasi	(orang)	25	25	125

Catatan :

Thn 2015 jumlah klp tani 364

Thn 2016 jumlah klp tani 451

Thn 2017 jumlah klp tani 548

**Setelah Revisi RPJMD**

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap  
Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Berau  
(sumber RPJMD Kab. Berau Bab IX hal 6)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Data Awal 2015	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					Capaian S/d Thn 2021
					2016	2017	2018	2019	2020	
1	Ketersediaan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan bagi masyarakat	Indeks Ketahanan pangan daerah	75%	75 %	76.5 %	78 %	79.5%	81%	82.5%
2			Jumlah ketersediaan pangan utama (pokok) (Kg/kapita/thn) -beras (ton) -jagung (ton) -kedelai (ton) -ubi kayu (ton) -ubi jalar (ton)	124 Kg/kapita /thn	124 Kg/kapita /thn	130 Kg/kapita /thn	135 Kg/kapita/thn	140 Kg/kapita /thn	155 Kg/kapita /thn	155 Kg/kapita /thn

## **BAB VII**

# **P E N U T U P**

Perencanaan strategis Dinas Pangan Kabupaten Berau untuk 2016 - 2021 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas pangan Kabupaten Berau menetapkan visi dengan memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Berau dilanjutkan dengan merumuskan misi dan menetapkan tujuan, serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk rencana strategis yang meliputi kebijakan dan program.

Keberhasilan Dinas Pangan sangat tergantung dari Komitmen dan Partisipasi dari seluruh Instansi yang terkait.

Rencana strategis Dinas Pangan Kabupaten Berau ini akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.

Tanjung Redeb, Oktober 2018

**Kepala Dinas Pangan  
Kabupaten Berau**

**FATTAH HIDAYAT, SE.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620828 198902 1 002

**REVISI RENSTRA DINAS PANGAN KABUPATEN BERAU**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**KABUPATEN BERAU TAHUN 2017-2021**

Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2015)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja pada akhir periode	
						Target Kinerja	(Rp.000)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Kinerja	Rp. (000)
								Target Kinerja	(Rp.000)	Target Kinerja	(Rp.000)	Target Kinerja	(Rp.000)	Target Kinerja	(Rp.000)	Target Kinerja	(Rp.000)		
		2.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	%	100.00%	1,243,000	100.00%	1,563,000	100.00%	1,647,500	100.00%	1,686,500	100.00%	1,832,500	100.00%	2,091,000	100.00%	8,820,500
		01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang bermaterai dan yang berperangko	Surat	700	1,500	800	3,000	850	3,000	850	3,500	850	3,500	850	4,000	4,200	17,000
		01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	65,000	12	80,000	12	80,000	12	80,000	12	80,000	12	80,000	60	400,000
		01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, Oli dan yang mendapat BBM	Unit	73	230,000	76	300,000	76	270,000	76	270,000	76	270,000	76	350,000	380	1,460,000
		01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan Pengelolaan administrasi keuangan, Perencanaan, Barang	bulan	12	230,000	12	250,000	12	260,000	12	260,000	12	280,000	12	300,000	12	1,350,000
		01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung yang dibersihkan	unit	1	3,000	1	5,000	1	5,000	1	6,000	1	6,500	1	7,000	5	29,500
		01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	jenis	4	10,000	10	10,000	10	11,000	10	11,000	10	11,000	10	12,000	50	55,000
		01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor	bulan	12	30,000	12	35,000	12	40,000	12	40,000	12	45,000	12	50,000	60	210,000
		01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan surat dan dokumen lainnya	bulan	12	9,000	12	10,000	12	11,000	12	12,000	12	13,000	12	15,000	60	61,000
		01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan bangunan kantor	paket	1	4,000	1	5,000	1	5,500	1	6,000	1	6,500	1	7,000	5	30,000
		01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	paket	2	68,000	2	100,000	5	120,000	7	120,000	8	130,000	10	200,000	32	670,000
		01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah tangga yang disediakan	paket	1	2,500	1	3,000	1	4,000	1	5,000	1	6,000	1	6,000	5	24,000
		01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan setiap bulan	bulan	12	10,000	12	12,000	12	13,000	12	13,000	12	16,000	12	20,000	60	74,000
		01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	bulan	12	30,000	12	50,000	12	55,000	12	60,000	12	65,000	12	70,000	60	300,000
		01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah orang untuk Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Org /Thn	40	300,000	50	350,000	50	400,000	50	400,000	50	450,000	50	500,000	250	2,100,000
		01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah kab. Berau	Org/Thn	50	70,000	50	150,000	50	150,000	50	180,000	50	200,000	50	220,000	250	900,000
		01.20	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi /teknis perkantoran yang tersedia	Org	6	180,000	6	200,000	6	220,000	6	220,000	6	250,000	6	250,000	6	1,140,000

		2.03.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	80.00%	145,000	80.00%	180,000	80.00%	170,000	100.00%	170,000	100.00%	170,000	100.00%	100.00%	100.00%	860,000
		02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di Rawat	Unit	12	25,000	12	80,000	12	70,000	12	80,000	12	90,000	12	100,000	60	420,000
		02.45	Pengadaan Sewa Kantor/ Rumah/ Gedung	Jumlah gedung kantor yang di Sewah	Unit	9	120,000	9	100,000	8	100,000	7	90,000	6	80,000	6	70,000	36	440,000
		2.03.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase kedisiplinan aparatur	%	85.00%	80,000	86.00%	-	87.5%	30,000	88.5%	-	90.00%	40,000	95.00%	-	95.00%	70,000
		03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Steel	150	80,000	0	-	60	30,000	0	-	60	40,000	0	-	120	70,000
		2.03.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kuifikasi pada Unit	%	55.00%	50,000	57.00%	100,000	65.00%	150,000	65.00%	170,000	65.00%	200,000	65.00%	250,000	-	870,000
		05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Org	5	50,000	5	100,000	5	150,000	5	170,000	5	200,000	5	250,000	25	870,000
		2.03.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Nilai Lakip	Skor	63	100,000	65	260,000	68	315,000	70	498,000	75	595,000	80	595,000	80	2,263,000
		06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja keuangan	laporan	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	5	375,000
		06.05	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Persentase kinerja program SKPD	%	70	25,000	72	75,000	73	75,000	75	75,000	76	100,000	78	100,000	78	425,000
		06.06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan dan keuangan SKPD	laporan	1	-	1	100,000	1	150,000	1	180,000	1	200,000	1	200,000	5	830,000
		06.09	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Laporan SKPD	laporan	1	-	1	10,000	1	15,000	1	18,000	1	20,000	1	20,000	5	83,000
		06.10	Kosolidasi, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program kegiatan	Program	0	-	0	-	0	-	8	150,000	8	200,000	8	200,000	8	550,000
		2.03.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	Persentase kelompok tani yang di dampingi	%	20.00%	1,236,000	30.00%	1,500,000	40.00%	1,650,000	45.00%	1,700,000	50.00%	2,000,000	55.00%	2,050,000	55.00%	8,900,000
		15.01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	Org	80	270,000	80	500,000	80	500,000	80	500,000	80	500,000	80	500,000	400	2,500,000
		15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Kelompok Tani dan pelaku agribisnis yang didampingi	Klp	44	466,000	44	500,000	44	550,000	44	550,000	44	600,000	44	600,000	220	2,800,000
		15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Kelembagaan petani dan nelayan yang dibina dan diberdayakan	Kelembagaan	50	500,000	50	500,000	50	600,000	50	650,000	50	650,000	50	700,000	250	3,100,000
		15.04	Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan Segar bagi masyarakat	Jumlah Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Kali	0	-	0	-	0	-	0	-	12	250,000	12	250,000	24	500,000
Meningkatnya ketersediaan pangan bagi masyarakat	Indek ketahanan pangan daerah (1,5% per tahun)		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (Pertanian/ Perkebunan)</b>	Jumlah ketersediaan pangan bagi masyarakat (beras)	Ton	18,236	2,025,000	18,500	3,520,000	19,000	3,350,030	19,300	3,700,030	19,800	4,500,030	20,400	5,210,000	97,000	20,280,090
	Jumlah ketersediaan pangan utama (pokok) (Kg/kapita/thn)	16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Analisis pola konsumsi pangan dan Suplai pangan	Dokumen	2	-	1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,350,000

	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)	16.04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Jumlah analisis rasio kebutuhan pangan	Dokumen	1	150,000	1	200,000	1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	300,000	5	1,250,000
		16.09	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah Kelompok Rumah Pangan Lestari	Kelompok	15	150,000	3	500,000	3	500,000	3	500,000	3	500,000	3	500,000	15	2,500,000
		16.10	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Jumlah analisis akses pangan daerah	Dokumen	1	120,000	1	150,000	1	150,000	1	200,000	1	200,000	1	250,000	5	950,000
		16.11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah analisis harga pangan pokok daerah	Dokumen	1	120,000	1	150,000	1	150,000	1	200,000	1	200,000	1	250,000	5	950,000
		16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	Ton	150	-	30	300,000	30	30	30	30	30	30	30	450,000	150	750,090
		16.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah pendampingan Desa Mandiri Pangan	Desa	7	150,000	2	200,000	2	200,000	2	250,000	2	300,000	2	350,000	10	1,300,000
		16.18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun dan dikembangkan	Unit	8	260,000	8	500,000	8	500,000	8	550,000	8	600,000	8	600,000	40	2,750,000
		16.23	Koordinasi Kebijakan Perberasan	Jumlah koordinasi kebijakan pengamanan stok pangan	Kali	15	150,000	3	200,000	3	200,000	3	250,000	3	250,000	3	300,000	15	1,200,000
		16.34	Diversifikasi Pangan Lokal	Jumlah diversifikasi pangan yang dikembangkan	jenis	3	350,000	3	400,000	3	450,000	3	500,000	3	500,000	3	500,000	15	2,350,000
		16.35	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang teridentifikasi	Desa	12	250,000	12	300,000	12	350,000	12	400,000	12	400,000	12	400,000	60	1,850,000
		16.36	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pengujian sampel pangan segar	Sampel	100	175,000	52	200,000	52	250,000	52	300,000	52	350,000	52	400,000	260	1,500,000
		16.37	Peningkatan peran dewan ketahanan pangan	Jumlah pertemuan dewan ketahanan pangan	Kali	5	150,000	3	200,000	3	250,000	4	300,000	4	350,000	4	360,000	18	1,460,000
		16.38	Konsolidasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pangan	Jumlah Program yang direncanakan	Program	0	-	8	220,000	8	150,000	0	-	0	-	0	-	16	370,000
		16.39	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Jumlah Kelompok yang didampingi	klp	0	-	0	-	0	-	0	-	5	200,000	5	200,000	10	400,000
		16.40	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Pangan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	Kali	0	-	0	-	0	-	0	-	14	350,000	14	350,000	28	700,000
		2.03.17	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Jumlah Hasil Pertanian yang dipasarkan</b>	<b>%</b>	<b>50.00%</b>	<b>150,000</b>	<b>50.00%</b>	<b>550,000</b>	<b>60.00%</b>	<b>600,000</b>	<b>60.00%</b>	<b>600,000</b>	<b>60.00%</b>	<b>650,000</b>	<b>60.00%</b>	<b>650,000</b>	<b>60.00%</b>	<b>3,050,000</b>
		17.02	Facilitasi kerjasama/regional Nasional penyediaan hasil produksi /perkebunan komplementer	Jumlah kelompok agribisnis yang dibina	Klp	10	150,000	10	250,000	10	300,000	10	300,000	10	350,000	10	350,000	50	1,550,000
		17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah pelaksanaan Promosi produk pertanian unggulan daerah	Kali	4	-	4	300,000	4	300,000	5	300,000	5	300,000	5	300,000	23	1,500,000
		2.03.20	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN</b>	<b>Jumlah penyuluh pertanian berkualitas (org)</b>	<b>org</b>	<b>50</b>	<b>3,230,000</b>	<b>50</b>	<b>4,550,000</b>	<b>55</b>	<b>4,650,000</b>	<b>60</b>	<b>5,200,000</b>	<b>65</b>	<b>5,300,000</b>	<b>70</b>	<b>5,350,000</b>	<b>70</b>	<b>25,050,000</b>

	20.04	Peningkatan Penyediaan Bahan-bahan Pelaksanaan Metodologi Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Kaji Terap yang difasilitasi	Demplot	15	350,000	10	400,000	10	450,000	10	500,000	10	500,000	10	500,000	50	2,350,000
	20.05	Sinkronisasi Perencanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	Jumlah dokumen, Perencanaan program penyuluhan	Dokumen	1	180,000	1	200,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	5	1,200,000
	20.06	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang dilatih	Org	15	500,000	20	750,000	20	750,000	20	750,000	25	850,000	25	900,000	110	4,000,000
	20.07	Pengembangan BPP Model	Jumlah BPP model yang difasilitasi	BPP	3	-	3	500,000	3	500,000	3	500,000	1	500,000	1	500,000	11	2,500,000
	20.14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang di Bangun/ diadakan	Unit	3	1,000,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	8	9,000,000
			Jumlah Sarana Pendukung Penyuluhan yang di diadakan	jenis	5	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	-
	20.15	Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL)	Jumlah penyuluh yang difasilitasi	Org	72	1,200,000	72	1,200,000	72	1,200,000	72	1,200,000	72	1,200,000	72	1,200,000	360	6,000,000
<b>JUMLAH</b>						<b>8,259,000</b>		<b>12,223,000</b>		<b>12,562,530</b>		<b>13,724,530</b>		<b>15,287,530</b>		<b>16,196,001</b>		<b>70,163,590</b>

Tanjung Redeb, Oktober 2018  
Kepala Dinas

**FATTAH HIDAYAT. SE.MM**  
NIP. 19620828 198902 1 002

**REVISI RENSTRA DINAS PANGAN KABUPATEN BERAU**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**KABUPATEN BERAU TAHUN 2017-2021**

Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode
							2017	2018	2019	2020	2021	
		2.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang bermaterai dan yang berperangko	lembar	700	800	850	850	850	850	4,200
		01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	60
		01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, Oli dan yang mendapat BBM	Unit	73	76	76	76	76	76	380
		01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan Pengelolaan administrasi keuangan, Perencanaan, Barang	bulan	12	12	12	12	12	12	12
		01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung yang dibersihkan	unit	1	1	1	1	1	1	5
		01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	jenis	4	10	10	10	10	10	50
		01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	60
		01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan surat dan dokumen lainnya	bulan	12	12	12	12	12	12	60
		01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan bangunan kantor	paket	1	1	1	1	1	1	5
		01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	paket	2	2	5	7	8	10	32
		01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah tangga yang disediakan	paket	1	1	1	1	1	1	5
		01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan setiap bulan	bulan	12	12	12	12	12	12	60

		01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12	60
		01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah orang untuk Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Org /Thn	40	50	50	50	50	50	250
		01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah kab. Berau	Org/Thn	50	125	125	125	125	125	625
		01.20	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi /teknis perkantoran yang tersedia	Org	6	6	6	6	6	6	6
		2.03.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal</b>	%	<b>80.00%</b>	<b>80.00%</b>	<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
		02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di Rawat	Unit	12	12	12	12	12	12	60
		02.45	Pengadaan Sewa Kantor/ Rumah/ Gedung	Jumlah gedung kantor yang di Sewah	Unit	9	9	8	7	6	6	36
		2.03.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase kedisiplinan aparatur</b>	%	<b>85.00%</b>	<b>86.00%</b>	<b>87,5%</b>	<b>88,5%</b>	<b>9.00%</b>	<b>95.00%</b>	<b>95.00%</b>
		03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Steel	150	0	60	0	60	0	120
		2.03.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit</b>	%	<b>55.00%</b>	<b>57.00%</b>	<b>65.00%</b>	<b>65.00%</b>	<b>65.00%</b>	<b>65.00%</b>	<b>65.00%</b>
		05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Org	5	5	5	5	5	5	25
		2.03.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Nilai Lakip</b>	<b>Skor</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
		06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja keuangan	laporan	1	1	1	1	1	1	5
		06.05	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Persentase kinerja program SKPD	%	70	72	73	75	76	78	78
		06.06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Program kegiatan yang di Monev	laporan	1	1	1	1	1	1	5
		06.09	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan dan keuangan SKPD	laporan	1	1	1	1	1	1	5

		06.10	Kosolidasi, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program kegiatan	Program	0	0	0	8	8	8	8
		2.03.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>Persentase kelompok tani yang di dampingi</b>	%	20.00%	30.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	55.00%
		15.01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	Org	80	80	80	80	80	80	400
		15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Kelompok Tani dan pelaku agribisnis yang didampingi	Klp	44	44	44	44	44	44	220
		15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Kelembagaan petani dan nelayan yang dibina dan diberdayakan	Kelembagaan	50	50	50	50	50	50	250
		15.04	Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan Segar bagi masyarakat	Jumlah Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Kali	0	0	0	0	12	12	24
Meningkatnya ketersediaan pangan bagi masyarakat	indek ketahanan pangan daerah (1,5% per tahun)	2.03.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (Pertanian/ Perkebunan)</b>	Jumlah ketersediaan pangan bagi masyarakat (beras)	ton	18,236	18,500	19,000	19,300	19,800	20,400	97,000
	Jumlah ketersediaan pangan utama (pokok) (Kg/kapita/thn)	16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Analisis pola konsumsi pangan dan Suplai pangan	Analisis	2	1	1	1	1	1	5
		16.04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Jumlah analisis rasio kebutuhan pangan	Analisis	1	1	1	1	1	1	5
		16.09	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kelompok	15	3	3	3	3	3	15
		16.10	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Jumlah analisis akses pangan daerah	Analisis	1	1	1	1	1	1	5
		16.11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah analisis harga pangan pokok daerah	Analisis	1	1	1	1	1	1	5
		16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	Ton	150	30	30	30	30	30	150
		16.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah pendampingan Desa Mandiri Pangan	Desa	7	2	2	2	2	2	10
		16.18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun dan dikembangkan	Unit	8	8	8	8	8	8	40
		16.23	Koordinasi Kebijakan Perberasan	Jumlah koordinasi kebijakan pengamanan stok pangan	Kali	15	3	3	3	3	3	15

	16.34	Diversifikasi Pangan Lokal	Jumlah diversifikasi pangan yang dikembangkan	jenis	3	3	3	3	3	3	15
	16.35	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang teridentifikasi	Desa	12	12	12	12	12	12	60
	16.36	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pengujian sampel pangan segar	Sampel	100	52	52	52	52	52	260
	16.37	Peningkatan peran dewan ketahanan pangan	Jumlah pertemuan dewan ketahanan pangan	Kali	5	3	3	4	4	4	18
	16.38	Konsolidasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pangan	Jumlah Program kegiatan yang direncanakan	Program	0	8	8	0	0	0	16
	16.39	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Jumlah Kelompok yang didampingi	klp	0	0	0	0	5	5	10
	16.40	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Pangan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	Kali	0	0	0	0	14	14	28
	2.03.17	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>Persentase Hasil Pertanian yang dipasarkan</b>	<b>%</b>	<b>50.00%</b>	<b>50.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>60.00%</b>
	17.02	Fasilitasi kerjasama/regional Nasional penyediaan hasil produksi /perkebunan komplementer	Jumlah kelompok agribisnis yang dibina	Klp	10	10	10	10	10	10	50
	17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah pelaksanaan Promosi produk pertanian unggulan daerah	Kali	4	4	4	5	5	5	23
	2.03.20	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN</b>	<b>Jumlah penyuluh pertanian berkualitas (org)</b>	<b>org</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	20.04	Peningkatan Penyediaan Bahan-bahan Pelaksanaan Metodologi Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Kaji Terap yang difasilitasi	Demplot	15	10	10	10	10	10	50
	20.05	Sinkronisasi Perencanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	Jumlah dokumen, Perencanaan program penyuluhan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
	20.06	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang dilatih	Org	15	20	20	20	25	25	110
	20.07	Pengembangan BPP Model	Jumlah BPP model yang difasilitasi	BPP	3	3	3	3	1	1	11

		20.14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang di Bangun/ diadakan	Unit	3	2	2	2	1	1	8
				Jumlah Sarana Pendukung Penyuluhan yang di diadakan	jenis	5	10	10	10	10	10	50
		20.15	Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL)	Jumlah penyuluh yang difasilitasi BOPnya	Org	72	72	72	72	72	72	360
		<b>JUMLAH</b>										

Tanjung Redeb, Oktober 2018  
Kepala Dinas

FATTAH HIDAYAT, SE.MM  
NIP. 19620828 198902 1 002